



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama perlu ditetapkan satuan kerja sebagai *pilot project*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);


9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan 210 (dua ratus sepuluh) Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama untuk selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal sebagai Unit Penggerak Integritas.
- KETIGA : Unit Penggerak Integritas dan Penilai Tim Internal Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Setiap Pimpinan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas dan memantau pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2016 pada satuan kerja masing-masing.

- KELIMA : Setiap satuan kerja wajib melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala kepada Menteri Agama melalui saluran hierarkis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2016


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
SAKIM SAIFUDDIN *l*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT*
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2016

A. PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

1. UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. UIN Sumatera Utara;
3. UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
4. UIN Raden Fatah Palembang;
5. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. UIN Walisongo Semarang;
9. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. UIN Sunan Ampel Surabaya;
11. UIN Alauddin Makassar;
12. IAIN Imam Bonjol Padang;
13. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
14. IAIN Padang Sidempuan;
15. IAIN Bukittinggi;
16. IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
17. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
18. IAIN Bengkulu;
19. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
20. IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
21. IAIN Pontianak;
22. IAIN Surakarta;
23. IAIN Purwokerto;
24. IAIN Salatiga;
25. IAIN Antasari Banjarmasin;
26. IAIN Mataram;
27. IAIN Jember;
28. IAIN Tulungagung;

29. IAIN Samarinda;
30. IAIN Palangkaraya;
31. IAIN Sultan Amai Gorontalo;
32. IAIN Ambon;
33. IAIN Manado;
34. IAIN Dato Karama Palu;
35. IAIN Palopo;
36. IAIN Kendari;
37. IAIN Ternate;
38. IAIN Batusangkar;
39. STAIN Pekalongan;
40. STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.

B. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
2. Direktorat Pendidikan Madrasah;
3. Direktorat Pendidikan Agama Islam;
4. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren;
5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

C. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

1. Kementerian Agama Kota Sabang, Provinsi Aceh;
2. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
4. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
5. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
6. Kementerian Agama Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
7. Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
8. Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
9. Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
10. Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
11. Kementerian Agama Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
12. Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

13. Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
14. Kementerian Agama Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
15. Kementerian Agama Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
16. Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
17. Kementerian Agama Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
18. Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
19. Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
20. Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
21. Kementerian Agama Kota Jambi, Provinsi Jambi;
22. Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
23. Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
24. Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
25. Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
26. Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan;
27. Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan;
28. Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir Timur (OKUT), Provinsi Sumatera Selatan;
29. Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
30. Kementerian Agama Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
31. Kementerian Agama Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
32. Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
33. Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
34. Kementerian Agama Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
35. Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
36. Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
37. Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
38. Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
39. Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
40. Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

41. Kementerian Agama Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
42. Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
43. Kementerian Agama Kabupaten Belitung Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
44. Kementerian Agama Kabupaten Belitung Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
45. Kementerian Agama Kabupaten Belitung Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
46. Kementerian Agama Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
47. Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
48. Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
49. Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
50. Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
51. Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
52. Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
53. Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
54. Kementerian Agama Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;
55. Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
56. Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
57. Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
58. Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
59. Kementerian Agama Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
60. Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
61. Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
62. Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
63. Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
64. Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
65. Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
66. Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
67. Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
68. Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

69. Kementerian Agama Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
70. Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
71. Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
72. Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
73. Kementerian Agama Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;
74. Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
75. Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
76. Kementerian Agama Kota Tangerang, Provinsi Banten;
77. Kementerian Agama Kota Serang, Provinsi Banten;
78. Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
79. Kementerian Agama Kabupaten Jembrana Selatan, Provinsi Bali;
80. Kementerian Agama Kabupaten Tabanan Selatan, Provinsi Bali;
81. Kementerian Agama Kabupaten Badung Selatan, Provinsi Bali;
82. Kementerian Agama Kabupaten Gianyar Selatan, Provinsi Bali;
83. Kementerian Agama Kabupaten Klungkung Selatan, Provinsi Bali;
84. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
85. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
86. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
87. Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
88. Kementerian Agama Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
89. Kementerian Agama Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
90. Kementerian Agama Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
91. Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
92. Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
93. Kementerian Agama Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
94. Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;
95. Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

96. Kementerian Agama Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
97. Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
98. Kementerian Agama Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
99. Kementerian Agama Kabupaten Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah;
100. Kementerian Agama Kabupaten Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;
101. Kementerian Agama Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
102. Kementerian Agama Kabupaten Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah;
103. Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
104. Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
105. Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
106. Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
107. Kementerian Agama Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
108. Kementerian Agama Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
109. Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
110. Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
111. Kementerian Agama Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
112. Kementerian Agama Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
113. Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
114. Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
115. Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
116. Kementerian Agama Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;
117. Kementerian Agama Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
118. Kementerian Agama Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
119. Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
120. Kementerian Agama Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;

121. Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;
122. Kementerian Agama Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
123. Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
124. Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
125. Kementerian Agama Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
126. Kementerian Agama Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
127. Kementerian Agama Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
128. Kementerian Agama Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
129. Kementerian Agama Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
130. Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
131. Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
132. Kementerian Agama Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
133. Kementerian Agama Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
134. Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
135. Kementerian Agama Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
136. Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
137. Kementerian Agama Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
138. Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
139. Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
140. Kementerian Agama Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo;
141. Kementerian Agama Kabupaten Pohuatu, Provinsi Gorontalo;
142. Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
143. Kementerian Agama Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
144. Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;
145. Kementerian Agama Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
146. Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

147. Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
148. Kementerian Agama Kabupaten Pulau Buru, Provinsi Maluku;
149. Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
150. Kementerian Agama Kota Tual, Provinsi Maluku;
151. Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
152. Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
153. Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
154. Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
155. Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
156. Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
157. Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat;
158. Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
159. Kementerian Agama Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat;
160. Kementerian Agama Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat;
161. Kementerian Agama Kabupaten Yapen, Provinsi Papua;
162. Kementerian Agama Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
163. Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
164. Kementerian Agama Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
165. Kementerian Agama Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SAIFUDDIN